**PIDANA MATI MENURUT HUKUM NASIONAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN HUKUM ISLAM[[1]](#footnote-1)**

**Oleh: Muh. Amin Arifin[[2]](#footnote-2)**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pelaksanaan pidana mati menurut hukum nasional dan bagaimanakah sinkronisasi pidana mati hukum nasional terhadap hukum Islam, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964, beserta terdapat juga pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan utuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali dari hak-hak asasi manusia. Namun di dalam pelaksanaannya lebih kepada tanggungjawab negara melindungi warga negaranya setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya. Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan balasan besrta efek jera bagi pelaku kejahatan, dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat dan untuk kemaslhatan umat manusia. 2. Sinkronisasi atau hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat pada persamaan dan perbedaan yang paling pokok diantara keduanya, yaitu *Persamaannya* terletak pada tujuan pemidanaannya antara pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam merupakan upaya yang terakhir dilakukan apabila upaya yang lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil. terletak pada sumber dan sistem yang digunakan (pidana mati dalam hukum pidana Indonesia bersumber pada KUHP dan UU yang bersangkutan, sedangkan pidana mati dalam hukum Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits). Hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat juga dalam peraturan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah mengeluarkan Fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dalam hal ini menhilangkna nyawa orang lain baik itu dalam bentuk narkotika maupun pembunuhan secara langsung, sebagaimana penetapan pidana mati diterapkan bagi pelaku narkotika ataupun pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia/nasional.

Kata kunci: pidana mati, Islam

1. **Latar Belakang**

Sejalan dengan pidana Indonesia yang menerapakan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu, dalam Islam juga dikenal adanya pidana mati yang dikenal dengan *qishash* yang artinya pembalasan yang sepadan. Menurut sebagian orang, makna dari *qishash* ini adalah si pelaku kejahatan. Bila ia melakukan pembunuhan, maka ia akan dihukum mati, bila ia melukai anggota tubuh korbannya, maka ia akan mendapat pembalasan dengan dilukai anggota tubuhnya seperti luka yang diderita korbannya.[[3]](#footnote-3)

Adapun yang menjadi dasar hukum *qishash* terdapat dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 178-179 dan surah Al-Maa’idah ayat 45. Pada surah tersebut menjelaskan dasar hukum, klasifikasi, teknis, tujuan, fungsi dan hikmah *qishash*. Benang merahnya adalah “dengan membunuh orang yang membunuh orang lain tanpa hak, akan terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang”.[[4]](#footnote-4) Dari dua Qur’an surah di atas, dapat dikatakan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi mengenai kehidupan, sebagaimana kesimpulan bahwa *Qishash* ialah mengambil pembalasan yang sama; dan *qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diat* (ganti rugi) yang wajar.[[5]](#footnote-5)

Eksistensi pidana mati juga diakui oleh (Majelis Ulama Indonesia) MUI. Majelis Ulama Indonesia mendukung keputusan pemerintah dalam menghukum mati para bandar narkotika dan obat-obatan berbahaya karena narkoba memiliki dampak negatif yang besar terhadap masyarakat. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, penegedar, dan penyalahgunaan narkoba. Ini adalah salah satu fatwa MUI dari 5 fatwa yang dikeluarkan.[[6]](#footnote-6) Dengan fatwa ini menegaskan bahwa Islam mendunkung adanya penerapan pidana mati di Indonesia sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa (Extra Ordinary).

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dalam perspektif yuridis mengenai pidana mati menurut hukum nasional dalam hubungannya dengan hukum islam, dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Dalam Hubungannya Dengan Hukum Islam”.**

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan pidana mati menurut hukum nasional?
3. Bagaimanakah sinkronisasi pidana mati hukum nasional terhadap hukum Islam?
4. **Metode Penelitian**

Untuk memperoleh dan mencari data yang di butuhkan dalam penulisan ini digunakan pendekatan yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

* + 1. **Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hukum Nasional**

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun menolak untuk memohon grasi dari Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Grasi No. 3 Tahun 1950 L.N. No. 40 Tahun 1950. Ditentukannya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Grasi, berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangannya presiden. Dan apabila ternyata di dalam Keputusan Presiden, pidana mati tersebut tetap akan dilaksanakan, pidana mati tersebut harus mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964 mengatur untuk terpidana *justiabel* peradilan sipil dan *yustiabel* peradilan militer. Terpidan *justiabel* peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964, sedangkan untuk terpidana *yustiabel* peradilan militer diataur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 2 tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku lagi,[[7]](#footnote-7) menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pelaksnaan pidana mati kemudian diubah oleh Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan ditembak sampai mati.[[8]](#footnote-8) Berikut tata cara pelaksanaan pidana mati menurut Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang No. 2 Pnps Tahun 1964, yaitu sebagai berikut:
2. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 2

* + - 1. Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama).
      2. Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3

1. Kepala Polisi daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam Pasal 2, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.
2. Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi Komisariat Daerah lain itu.
3. Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 4

Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaannya.

Pasal 5

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.

Pasal 6

1. Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.
2. Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 7

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan..

Pasal 8

Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permitaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9

Pidana mati tidak dilaksanakan di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden.

Pasal 10

1. Kepala Polisi Daerah membentuk suatu Regu Penembak dari Brigade Mobile yang terdiri dari seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira.
2. Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak memepergunakan senjata organiknya.
3. Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4 sampai selesai pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11

1. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.
2. Jika diminta, dapat disertai oleh seorang perawat rohani.
3. Pidana berpakaian sederhana dan tertib.
4. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.

Pasal 12

1. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut.
2. Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13

1. Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam Pasal 4.
2. Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

Pasal 14

1. Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
2. Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
3. Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komando Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyetakkan pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
4. Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
5. Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta seorang dokter.

Pasal 15

1. Penguburan diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab memutuskan lain.
2. Dalam hal terakhir ini, dan juga kemungkinan tidak ada pelaksanaan penguburan oleh keluarganya atau sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh Negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.

Pasal 16

1. Jaksa Tinggi/Jaksa yang disebut dalam Pasal 4 harus membuat berita acara daripada pelaksanaan pidana mati.
2. Isi daripada berita acara itu disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya, sedang pada berita acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang dinyatakan bahwa isi berita acara telah disalinkan ke dalam Surat Putusan Pengadilan bersangkutan.
3. Salinan tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti aslinya.
4. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, di Lingkungan Peradilan Militer.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer dilakukan menurut ketentuan termaksud dalam Bab I dan II, dengan ketentuan bahwa:

1. Kata-kata “Menteri Kehakiman” termaksud dalam Pasal 2 harus dibaca “Menteri/Panglima Angkatan yang bersangkutan”;
2. Kata-kata “Kepala Polisi Komisariat Daerah” dalam Bab II harus dibaca “Panglima/Komandan Daerah Militer”;
3. Kata-kata “Jaksa Tinggi/Jaksa” dalam Bab II harus dibaca “Jaksa Tentara/Oditur militer”;
4. Kata-kata “Brigade Mobile” dalam Pasal 10 ayat (1) dan “Polisi” dalam Pasal 11 ayat (1) hrus dibaca “militer”;
5. Pasal 3 ayat (1) harus dibaca “Jika dalam penentuan waktu da tempat itu tersangkut wewenang Panglima/Komandan Daerah tempat kedudukan pengadilan militer yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama merundingkannya dengan Panglima atau Komandan dari Angkatan yang bersangkutan”.
6. Pasal 11 ayat (3) harus dibaca “Terpidana, jika seorang militer maka dia berpakaian dinas harian tanda pangkat dan atau tanda-tanda lainnya”.[[9]](#footnote-9)
7. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010

Dalam pelaksanaan pidana mati sesuai Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 meliputi tahapan sebagai berikut:

* 1. Persiapan;
  2. Pengorganisasian;
  3. Pelaksanaan; dan
  4. Pengakhiran.
     1. **Sinkronisasi Pidana Mati Menurut Hukum Nasional Terhadap Hukum Islam**

Sinkronisasi atau hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat pada persamaan dan dan perbedaan keduanya. **Persamaannya** yaitu *Pertama*, terletak pada tujuan pemidanaannya antara pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam merupakan upaya yang terakhir dilakukan apabila upaya yang lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil. *Kedua*, adanya pelaksanaan pidana mati. Menurut pidana Indonesia pengawasannya dilakukan oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah, sedangkan menurut hukum Islam pengawasan dilakukan oleh penguasa setempat. *Ketiga*, pidana mati merupakan pidana pokok menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. *Keempat*, pidana mati masih diberlakukan dalam hukum pidana Indonesia dan hukum Islam. **Perbedaannya** yaitu *Pertama,* terletak pada sumber dan sistem yang digunakan (pidana mati dalam hukum pidana Indonesia bersumber pada KUHP dan UU yang bersangkutan, sedangkan pidana mati dalam hukum Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits). *Kedua*, tentang penentuan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia di tentukan oleh hakim sedangkan dalam hukum Islam ditentukan oleh keluarga korban. *Ketiga,* pidana mati dalam hukum pidana Indonesia bisa berubah menurut zaman sedangkan dalam hukum Islam pidana mati bersifat kekal dan tetap. *Keempat*, perbedaan yang terakhir yaitu pidana mati dalam hukum pidana Indonesia lebih mengarah kepada penjeraan kepada terpidana sedangkan hukum Islam lebih merupakan pencegahan kejahatan karena eksekusi dilakukan di tempat umum.[[10]](#footnote-10)

Hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam juga terdapat dalam peraturan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah mengeluarkan Fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati sebagaimana penetapan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia/nasional. Melalui Fatwa Nomor 10/MUNASVII/M UI/14/2005 tentang Hukuman Mati dalam tindak pidana tertentu yaitu dalam hal ini mengenai perampasan nyawa seseorang, yang mana hukum Indonesia juga menetapkan pidana mati bagi pelaku pembunuhan berencana dan narkotaika yang bisa merenggut nyawa. Fatwa ini dikeluarakan pada tanggal 29 juli 2005. Secara tegas MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan bahwa “Islam mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam *jarimah* (tindak pidana), *Hudud,* *Qishash*, dan *Ta’zir*”. Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada kejahatan pidana tertentu. Dalam pandangan Islam menghilangkan nyawa orang lain hanya boleh karena dua faktor yaitu:

* + - 1. Karena kehendak Allah.
      2. Konsekuensi penegakan hukumnya (eksekusi atas putusan hakim).[[11]](#footnote-11)

Atas dasar ini konsep hukum Islam menetapkan perbuatan tertentu yang dianggap sebagai kejahatan yang melanggar hukum *(jarimah)* dan karenanya diancam hukuman. Kejahatan dalam hukum Islam dibagi atas tiga bagian yaitu:

* + 1. Tindakan Kejahatan yang diancam dengan hukuman tertentu dan mutlak *(Al-Hudud)* yang mencakup kejahatan-kejahatan seperti:
       1. Hubungan seks yang tidak legal (zina).
       2. Menuduh orang berzina *(qazf).*
       3. Meminum minuman yang memabukkan.
       4. Pencurian.
       5. Perampokan yang disertai dengan pembunuhan.
       6. Merekayasa huru-hara/subversi.
       7. Murtad dari agama Islam.
    2. Tindakan Kejahatan yang diancam hukuman pembalasan *(Al-Qishash)* dan ganti rugi *(Al-Diyat).*

Disini terdapat perpaduan antara hak Allah dengan hak manusia.

Contoh: dalam kasus pembunuhan, hukuman yang pertama adalah *Qishash* dengan menjatuhkan hukuman mati bagi sipembunuh setelah terbukti dan terpenuhi syarat-syaratnya, tetapi dalam keadaan ahli waris si terbunuh memberi maaf maka hukumannya menjadi membayar *diat* (sejenis ganti rugi) yang besarnya seperti 100 ekor unta, 200 ekor unta, inilah yang dimaksud dengan perpaduan hak Allah dengan hak manusia.

* + 1. Tindakan kejahatan yang hukumannya diserahkan kepada keputusan Hakim *(At-Ta’zir).*

Contohnya: berduaan dengan lawan jenis yang tidak halal, merugikan harga diri kehormatan orang lain.[[12]](#footnote-12)

Kejahatan-kejahatan yang diancam hukuman mati dalam kejahatan Islam antara lain:

* + 1. Perbuatan zina yang telah bersuami istri dengan dirajam sampai mati (konsep) hukuman mati yang tertulis dalam teks Al-Qur’an.
    2. Perampokan dan subvesi.
    3. Pembunuhan (menghilankan nyawa orang lain) dalam hal tidak mendapat kemaafan dari ahli waris.
    4. Penghianatan terhadap agama *(murtad).*
       1. Ada dua macam prbuatan pelanggar hukum yang akan dikenai hukum *qishash* yaitu:
          1. Dilakukan terhadap orang yang pembunuhan yang sebenarnya tidak layak (pembunuhan tanpa hak), yaitu pembunuhan dengan sengaja beberapa orang membunuh wanita muslimah.
          2. Pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak.
       2. Sedangkan pembunuhan yang tidak perlu di *qishash* antara lain:
          1. Pembunuhan agak sengaja.
          2. Pembunuhan tidak sengaja.
          3. Pembunuhan tidak langsung.
          4. Muslim mebunuh kafir.
          5. Orangtua membunuh anaknya atau anak membunuh orangtuanya.
          6. Suami yang membunuh istrinya yang selingkuh atau sebaliknya.[[13]](#footnote-13)

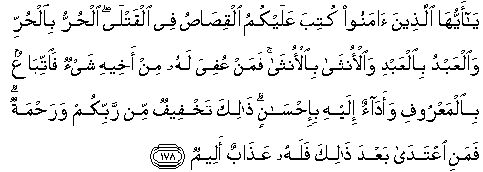
Sanksi pidana yang dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati juga terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW, yaitu:

**لا يحل دم امد ئ مسلم ا لا با حد ي ثلاث : كفر بعد ا يما ن و وذن بعد ا حصا ن و قتل نفس بغير نفس**

*Artinya: “Tidak halal darah seorang muslim kecuali sebab tiga hal: karena membunuh jiwa, seorang janda/duda berzina, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah”. (H.R. Bukhari dan Muslim).*[[14]](#footnote-14)

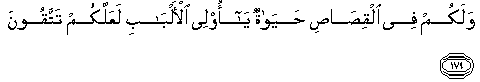
Pengaturan hukuman mati terdapat dalam Al-qur’an dan Al-Hadits, yaitu antara lain sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah ayat 178



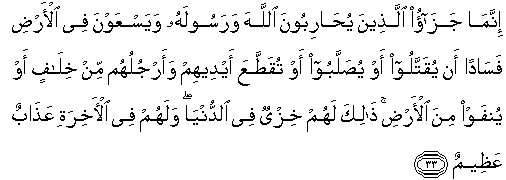
*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Baraangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.*[[15]](#footnote-15)

Q.S. Al-Baqarah ayat 179



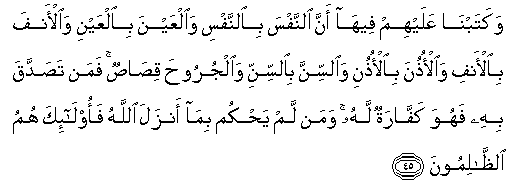
*Artinya:* “*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.*[[16]](#footnote-16)

Q.S. Al-Ma’idah ayat 33



*Artinya: “Hukuman bagi yang memerangi Allah dan utusan-Nya, mereka harus dibunuh, atau dipotong tangan mereka atau kaki mereka berselang-seling, atau dipenjara, inilah kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat kelak, mereka akan diganjar dengan siksaan yang dahsyat”.*[[17]](#footnote-17)

Q.S. Al-Ma’idah ayat 45



*Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada Qishash, maka melepaskan hak itu (menjadi) menebus dosa baginya, barangsiapa tidak memutus perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah maka itu adalah orang-orang yang zalim”.*[[18]](#footnote-18)

Ayat di atas secara tegas menginformasikan bahwa ditetapkannya pidana *qishash* itu dalam sistem hukum pidana Islam, agar kehidupan manusia itu menjadi langgeng (terjamin). Sebab dengan adanya pidana itu manusia akan berpikir untuk melakukan pembunuhan, karena ia menyadari bahwa membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri. Jadi, pencantuman pidana *qishash* itu dimaksudkan sebagai tekanan awal secara pisikologis bagi setiap calon pelaku pembunuhan agar mengurungkan niatnya itu. Dengan demikian bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan yang berat dapat dikategorikan melakukan kerusakan besar di muka bumi, yaitu kejahatan narkotika, pembunuhan berencana yang sadis, maka wajarlah mereka di hukum mati.

Hukuman *qishash* (pembalasan untuk mendidik dan memberi pengarahan kepada masyarakat umum agar mereka tidak melakukan kejahatan, manusia itu menjadi penjahat pasti ada faktor penyebabnya yaitu disebabkan faktor tekanan ekonomi, pengangguran, lingkungan, dan sebagainya.[[19]](#footnote-19)

Penjatuhan hukuman mati merupakan salah satu wujud dari ajaran Islam yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kehidupan manusia. Di negara-negara mayoritas muslim, pidana mati tidak pernah diperdebatkan karena sepenuhnya diyakini berasal dari Tuhan.[[20]](#footnote-20)

**PENUTUP**

* + - * 1. **Kesimpulan**
    1. Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan pidana mati telah diatur dalam Perkap (Peraturan Kapolri) No. 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pidana Mati, Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964, beserta terdapat juga pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan utuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali dari hak-hak asasi manusia. Namun di dalam pelaksanaannya lebih kepada tanggungjawab negara melindungi warga negaranya setiap tindakan yang diperbuat oleh warga negaranya. Tujuan pemberlakuan hukuman mati untuk memberikan balasan besrta efek jera bagi pelaku kejahatan, dari aspek kemanusiaan hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan orang jahat dan untuk kemaslhatan umat manusia.
    2. Sinkronisasi atau hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat pada persamaan dan perbedaan yang paling pokok diantara keduanya, yaitu *Persamaannya* terletak pada tujuan pemidanaannya antara pidana mati menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam merupakan upaya yang terakhir dilakukan apabila upaya yang lain untuk menangani kejahatan tidak berhasil. terletak pada sumber dan sistem yang digunakan (pidana mati dalam hukum pidana Indonesia bersumber pada KUHP dan UU yang bersangkutan, sedangkan pidana mati dalam hukum Islam bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits). Hubungan pidana mati hukum pidana Indonesia/nasional terhadap hukum Islam terdapat juga dalam peraturan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang telah mengeluarkan Fatwa mengenai dibolehkannya negara menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan dalam hal ini menhilangkna nyawa orang lain baik itu dalam bentuk narkotika maupun pembunuhan secara langsung, sebagaimana penetapan pidana mati diterapkan bagi pelaku narkotika ataupun pembunuhan berencana dalam hukum pidana Indonesia/nasional.
       - 1. **Saran**
    3. Dalam hal pelaksanaan pidana mati menurut hukum pidana Indonesia/nasional, pemerintah Indonesia perlu mempertahankan pidana mati demi melindungi kemaslahatan umat manusia secara umum dan dengan mempertahankan pidana mati akan berguna untuk meningkatkan keamanan dan rasa tentram di masyarakat terhadap pelaku kejahatan-kejahatan luar biasa *(exstra ordinary).*
    4. Hukum Islam merupakan hukum yang selalu tumbuh dan relevan di setiap zaman. Islam telah meletakkan dasar hukum yang jelas mengenai hukuman mati dalam Al-Qur’an dan Al-Hadits mengenai *qishash-diyat* (pembalasan dan ganti rugi). Maka dari itu perlu digali lebih dalam nilai yang terkandung dalam tata hukum Islam, untuk mencapai kesempurnaan hidup dan demi kemajuan keilmuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur’an dan Terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Palu, Sinar Grafika, 2007).

Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).

Chawazi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Malang, Rajawali Pers, 2001).

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia “suatu pengantar”,* (Pekanbaru-bandung, Reflika Aditama, 2010/2011).

Irmansyah, Ariestandi, Rizky, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi,* (Balikpapan, Graha Ilmu, 2013).

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Manado, Rajawali Pers, 2012).

Muslich, Wardi, Acmad, *Hukum Pidana Islam*, (Serang, Sinar Grafika, 2004).

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung, Redaksi Reflika, 2003).

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Yogyakarta, Rajawali Pers, 2010).

Purba, Nelvita dan Sulisryawati, Sri, *Pelaksanaan Hukuman Mati dalam Persfektif HAM dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Medan, Graha Ilmu, 2014).

Sahetapy, J.H, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, (Citra Aditya Bakti, Surabaya, 2005).

Samin, Sabri, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta, Kholam Publishing, 2007).

Smith, Bin, Atho, *Bahan Kuliah Agama Islam*, (Manado, 2012).

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009).

Wasyik, Rakhmat, *Perbandingan Hukum Pidana Mati Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia,* Skripsi, Abstrack, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007).

**SUMBER-SUMBER LAINNYA**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Buana Press, 2014).

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Peraturan Kepala Kepolisiaan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Putra Basuki, Randy Pinangga, *Skripsi “Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia”.pdf.*

[*http://bimoadiwicaksono.blogspot.co.id/2010/08/perbandingan-pidana-mati-dalam.html?m=1*](http://bimoadiwicaksono.blogspot.co.id/2010/08/perbandingan-pidana-mati-dalam.html?m=1)Di akses pada hari Jum’at tanggal 16 oktober 2015 pada jam 14:10.

[*https://segopeyek.wordpress.com/contoh-kasus/*](https://segopeyek.wordpress.com/contoh-kasus/)*.* Di akses pada Hari Minggu 24 Januari 2016 pada Jam 21:15.

[*http://news.liputan6.com/read/2397266/selama-2015-lima-pengedar-narkoba-divonis-mati-di-riau*](http://news.liputan6.com/read/2397266/selama-2015-lima-pengedar-narkoba-divonis-mati-di-riau)*.* Di akses pada Hari Minggu 24 Januari 2016 pada Jam 21:15.

[*http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/mui-dukung-hukuman-mati-*](http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/mui-dukung-hukuman-mati-)*bandar-narkoba.html.* Di akses pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pada jam 21:15.

1. Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Tonny Rompis, SH, MH dan Roy R. Lembong, SH, MH. [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711140. [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat:[*http://bimoadiwicaksono.blogspot.co.id/2010/08/perbandingan-pidana-mati-dalam.html?m=1*](http://bimoadiwicaksono.blogspot.co.id/2010/08/perbandingan-pidana-mati-dalam.html?m=1) Di akses pada hari Jum’at tanggal 16 oktober 2015 pada jam 14:10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 12. [↑](#footnote-ref-4)
5. Irmansyah, Ariestandi, Rizky, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi,* (Balikpapan, Graha Ilmu, 2013), hlm. 93. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat:*http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba.html.* Di akses pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pada jam 21:15. [↑](#footnote-ref-6)
7. Prasetyo, Teguh, *Op,Cit*, hlm. 119-120. [↑](#footnote-ref-7)
8. Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Manado, Rajawali Pers, 2012), hlm. 241. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pasal 2-17 Undang-Undang No. 2 Pnps tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wasyik, Rakhmat, *Perbandingan Hukum Pidana Mati Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia,* Skripsi, Abstrack, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007), di akses pada tanggal 11 November 2015. [↑](#footnote-ref-10)
11. Purba, Nelvita dan Sulistyawati, Sri, *Op.Cit*, hlm. 74-75. [↑](#footnote-ref-11)
12. Purba, Nelvita dan Sulistyawati, Sri, *Ibid*, hlm. 75-76. [↑](#footnote-ref-12)
13. Purba, Nelvita dan Sulistyawati, Sri, *Ibid,* hlm. 76. [↑](#footnote-ref-13)
14. H.R. Bukhari dan Muslim. [↑](#footnote-ref-14)
15. Q.S. Al-Baqarah ayat 178 Kementerian Agama Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-15)
16. Q.S. Al-Baqarah ayat 179 Kementerian Agama Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-16)
17. Q.S. Al-Ma’idah ayat 33 Kementerian Agama Republik Indonesia [↑](#footnote-ref-17)
18. Q.S. Al-Ma’idah ayat 45 Kementerian Agama Republik Indonesia. [↑](#footnote-ref-18)
19. Purba, Nelvita dan Sulistyawati, Sri, *Op.Cit*, hlm. 95. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid*, hlm. 158. [↑](#footnote-ref-20)